RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014-2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
SURABAYA 60116

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 050 / 762 / KPTS / 120 / 2017

T E N T A N G

REVIEW RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014 -2019

Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

b. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Review Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019**

KESATU : Review Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019, merupakan tinjauan kembali terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi setelah 2 tahun masa awal perencanaan.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan yang menggambarkan Strategi, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, dengan Sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Bab III : Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Serta Arah Kebijakan

Bab V

Bab V : **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bab VI : **Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019**

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja / akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KEEMPAT : Isi dan uraian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Tanggal: Juni 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di lingkungan BadanPendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur ;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, rangkaian proses penyusunan Review dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu.

Review atau perubahan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2017 (tahun III perencanaan strategis) merupakan bentuk penyesuian terhadap beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya terkait dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan penyesuaian indikator/target kinerja berdasarkan perkembangan 2 tahun terakhir.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sekaligus untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang menunjang capaian kinerja utama daerah.

Dengan tersusunnya dokeumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perencanaan tahunan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel, seerta dapat memberikan manfaat bagi pelaksana kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, Juni 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... iii

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 8
1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 10
2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 11
2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 15
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 18
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur..... 18
2.2.2 Aset dan Modal..... 18
2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional..... 20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 25

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 26

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 26
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 29
3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L…..... 34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) 35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 36

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN 41

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 41
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 43

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 47

I. Rencana Tahun Pertama (2015) 47

DAFTAR ISI

II. Rencana Tahun Kedua (2016) 57
III. Rencana Tahun Ketiga (2017) 67
IV. Rencana Tahun Keempat (2018) 76
V. Rencana Tahun Kelima (2019) 104

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019..... 171

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Golongan Ruang.....	19
Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.....	22
Tabel 2.4.a	Target Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.....	23
Tabel 2.4.b	Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.....	24
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	28
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	32
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35
Tabel 3.4	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
Tabel 3.5	Nilai Skala Kriteria.....	39
Tabel 3.6	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis.....	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	42
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	46
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019.....	133
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	11
Gambar 2.2	Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, pembentukan Perangkat Daerah. serta adanya perubahan asumsi yang berpengaruh terhadap capaian akhir kinerja utama daerah. Evaluasi dan penyesuaian dokumen perencanaan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan dinamika tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan penganggaran merupakan suatu sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yaitu ***”Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”*** berlangsung dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu ***"Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik".*** Misi tersebut merupakan suatu hal yang

berkesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari Misi sebelumnya (tahun 2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Lima Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk Mewujudkan Visi ***“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”*** adalah sebagai berikut; ***Misi Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan***. ***Misi Kedua: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Misi Ketiga: Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang. Misi Keempat: Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Serta Misi Kelima: Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial.*** Di dalam Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik mempunyai Tujuan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance)* dan bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik. Dan mempunyai 8 (delapan) Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya layanan informasi publik,
2. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas,
3. Meningkatnya minat baca masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal,
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan,
5. Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah,
6. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana,
8. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dilaksanakan berlandaskan 3 (tiga) Strategi umum yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*),

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*),
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahunan, untuk menjabarkan rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta strategi pembangunan daerah berupa Kebijakan Pendapatan dan Belanja.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hal :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun;
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksaaan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan satu bagian utuh manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan agenda pembangunan sebagaimana ditungkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Keberadaan dokumen tersebut akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Terkait dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka terhadap penjabaran RKPD Provinsi Jawa Timur untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah ;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan,
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN
Memuat :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Mendeskripsikan :
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur
2.2.2 Aset dan Modal
2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat :
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat dan menjelaskan :
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

BAB V
INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019
Memuat Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB VII
PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Pendapatan Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan,
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
e. Pelaksanaan administrasi badan di didang keuangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Sub Perlengkapan
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan:
   a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
   b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan
   c. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan;

4. Bidang Pajak Daerah:
   a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
   c. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain :
   a. Sub Bidang Retribusi
   b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
   c. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan :
   a. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
   b. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
   c. Sub Bidang Evaluasi Kinerja
7. Unit Pelaksana Teknis Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

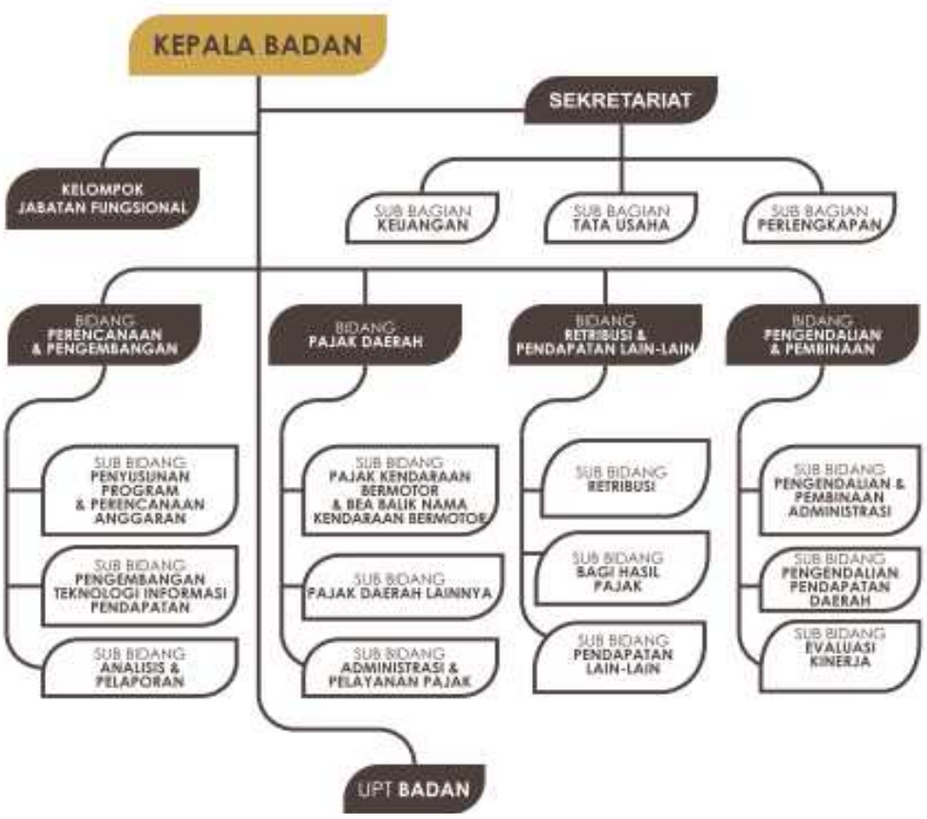

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
   a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
   c. Pengelolaan administrasi keuangan;
   d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
   e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
   f. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
   g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
   h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
   i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
   j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
   k. Pelaksanaan tugas-tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan pelaporan data pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Perumusan kebijakan perencanaan pendapatan dan belanja serta pengembangan sistem/teknologi informasi bidang pendapatan;
   b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
   c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
   d. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pengangggaran;
   e. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sistem informasi pendapatan;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
g. Pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerjasama dan produk hukum lainnya;
h. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan;dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, pembayaran, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang pajak daerah;
   b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
   c. Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan keberatan pajak daerah (doleansi);
   d. Perumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak daerah;
   e. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak daerah;
   f. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah (doleansi) dan pengaduan pelayanan;
   g. Pengoordinasian kebijakan pajak daerah dengan instansi terkait;
   h. Pelaksanaan penyusunan kajian pemungutan pajak daerah;
   i. Perumusan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan;
   j. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah;
   k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelayanan publik dan pemungutan pajak daerah;dan
   l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah, penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendapatan Lain-Lain, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak.bukan pajak, serta pendapatan lain-lain;
d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak.bukan pajak serta pendapatan lain-lain;
e. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan piutang retribusi daerah;
f. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
g. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan objek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan pendapatan lain-lain;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak/bukan pajak;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal, meliputi teknis adminsitrasi dan operasional, keuangan barang dan pegawai dengan rincian tugas sebagai berikut;
   a. Perumusan kebijakan bidang pengendalian dan pembinaan;
   b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
   c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
   d. Pelaksanaan pengendalian meliputi teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
   e. Pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan, barang, pegawai dan teknologi informasi;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan pengawas eksternal;

g. Pelaksanaan evaluasi kinerja Badan;

h. Penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi;

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran;

j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana teknis operasional atau kegiatan teknis tertentu, mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, pelayanan masyarakat serta tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki fungsi:

a Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

b Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;

c Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;

d Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

e Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;

f Pelaksanaan pelayanan masyarakat;dan

g Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

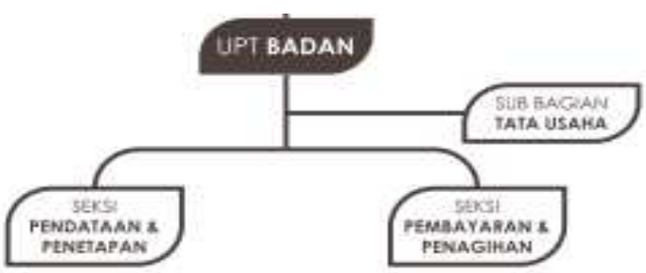

Sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan dan pelaksana urusan administrasi teknis operasional, serta pelayanan langsung kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
2. Sub Bagian Tata Usaha,
3. Seksi Pendataan dan Penetapan,
4. Seksi Pembayaran dan Penagihan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, meliputi;

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan berkedudukan di Surabaya;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat berkedudukan di Surabaya;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik berkedudukan di Gresik;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo berkedudukan di Sidoarjo;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto berkedudukan di Mojokerto;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang berkedudukan di Jombang;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan berkedudukan di Lamongan;

11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban berkedudukan di Tuban;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun berkedudukan di Madiun;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi berkedudukan di Ngawi;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan berkedudukan di Magetan;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo berkedudukan di Ponorogo;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan berkedudukan di Pacitan;
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri berkedudukan di Kediri;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Blitar berkedudukan di Blitar;
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung berkedudukan di Tulungagung;
20. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek berkedudukan di Trenggalek;
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk berkedudukan di Nganjuk;
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota berkedudukan di Malang;
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan berkedudukan di Malang;
24. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota berkedudukan di Kota Batu;
25. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan berkedudukan di Pasuruan;
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Probolinggo berkedudukan di Probolinggo;
27. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang berkedudukan di Lumajang;
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember berkedudukan di Jember;

29. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso berkedudukan di Bondowoso;
30. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo berkedudukan di Situbondo;
31. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi;
32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan berkedudukan di Pamekasan;
33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang berkedudukan di Sampang;
34. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan berkedudukan di Bangkalan;
35. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep berkedudukan di Sumenep.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah didukung oleh keterserdiaan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia/Aparatur dengan jumlah 1456 (seribu empat ratus lima puluh enam) personil, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 811 (delapan ratus sebelas) orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) orang (Data tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016).

2.2.2 Aset dan Modal

Sampai dengan tahun 2016 aset tetap yang status penggunaannya ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 66.383 aset, dengan nilai sebesar Rp 533.374.091.152,00, terdiri atas: golongan tanah; golongan peralatan dan mesin; golongan gedung dan bangunan: golongan jalan, irigasi dan jaringan; golongan aset tetap lainnya serta golongan konstruksi dalam pekerjaan. Komposisi aset golongan gedung dan bangunan diantaranya adalah 1 kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 35 Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur dan 48 Kantor Bersama Samsat dengan lokasi tersebar di seluruh Jawa Timur, sedangkan aset jenis alat angkutan terdiri atas kendaraan operasional roda 4 maupun roda 2 sebanyak 962 unit

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
(Berdasarkan Golongan Ruang)

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/d)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	18
3	Pembina (IV/a)	55
4	Penata Tingkat I (III/d)	118
5	Penata (III/c)	66
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	175
7	Penata Muda (III/a)	54
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	12
9	Pengatur (II/c)	166
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	91
11	Pengatur Muda (II/a)	27
12	Juru Tingkat I (I/d)	7
13	Juru (I/c)	16
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	5
	JUMLAH	811

(Data: per 31 Desember 2016)

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S – 3 (Doctoral)	2
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	101
3	S – 1 (Sarjana) / D-IV	324
4	D-III	37
5	SLTA	295
6	SLTP	32
7	SD	20
	JUMLAH	811

(Data: per 31 Desember 2016)

2.2.3 Unit Operasional Pelayanan

Kondisi saat ini (sampai dengan akhir tahun 2016) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur didukung oleh unit operasional pelayanan di daerah, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, 46 (empat puluh enam) Kantor Bersama Samsat Induk dan 2 (dua) Samsat Kepulauan, 26 (dua puluh enam) Pelayanan Samsat Drive Thru, 70 (tujuh puluh) Pelayanan Samsat Payment Point, 10 (sepuluh) Pelayanan Samsat Corner, 57 (lima puluh tujuh) Pelayanan Samsat Keliling, 1 (satu) Bus Samsat Keliling, dan 11 Layanan PPOB Pos hasil kerjasama dengan PT. Pos Indonesia, memanfaatkan kantor pos di Jawa Timur untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penyediaan layanan bukan hanya outlet layanan berbasis lokasi, akan tetapi juga disediakan layanan *self service*, dengan cara melakukan akses pada alamat web :*www.e-samsat.jatimprov.go.id* dengan keuntungan dapat dilakukan setiap saat dan dari mana saja.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pemerataan pelayanan publik di setiap Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu agar dapat semakin memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

Sumber daya lainnya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berupa Potensi Objek Pajak, dimana sampai dengan Akhir Tahun 2016 jumlah total objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebanyak 17.078.429 (tujuhbelas juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan) Kendaraan Bermotor, terdiri dari 15.046.589 (limabelas juta empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), 2.029.904 (dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Alat Berat/Besar

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 (sesuai Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014) sebagaimana **Tabel 2.3** memiliki sasaran strategis sebagai berikut;

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

No.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	22,00%	21,99%	7,13%	20,36%	22,43%	338,46%	338,31%	109,69%	313,23%	345,08%
			2. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB	20%	20%	20%	20%	3,75%	85,52%	87,46%	91,99%	93,06%	6,94%	427,60%	437,30%	459,95%	465,30%	185,07%
II.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Nilai IKM	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00	84,41	85,06	86,19	88,29	88,08	101,09%	101,26%	102,00%	103,87%	103,62%
			2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

TABEL 2.4.a

TARGET ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2010-2014

No	Uraian	Target Anggaran dan Belanja Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	2014 (APBD)
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.334.650.000.000**	**6.897.500.000.000**	**7.751.000.000.000**	**8.617.350.000.000**	**9.304.467.000.000**
	a. Pajak Daerah	**5.322.150.000.000**	**6.881.000.000.000**	**7.733.400.000.000**	**8.598.000.000.000**	**9.285.000.000.000**
	- PKB	2.100.000.000.000	2.610.000.000.000	3.243.000.000.000	3.594.000.000.000	3.950.000.000.000
	- BBNKB	2.240.000.000.000	3.150.000.000.000	3.181.400.000.000	3.500.000.000.000	3.660.000.000.000
	- PBBKB	950.000.000.000	1.103.000.000.000	1.285.000.000.000	1.480.000.000.000	1.650.000.000.000
	- P AP	16.000.000.000	18.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000
	- P ABT	16.150.000.000				
	b. Retribusi Daerah	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.600.000.000**	**2.350.000.000**	**2.467.000.000**
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**11.000.000.000**	**15.000.000.000**	**16.000.000.000**	**17.000.000.000**	**17.000.000.000**
2	**BELANJA DAERAH**	**404.737.013.599**	**525.168.108.532**	**576.121.607.500**	**550.258.461.630**	**594.552.841.000**
	a. Belanja Tidak Langsung	222.612.066.400	260.522.620.576	282.608.580.000	293.456.849.630	337.751.229.000
	b. Belanja Langsung	182.124.947.199	264.645.487.956	293.513.027.500	256.801.361.200	256.801.612.000

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.4.b

REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2010-2013

No	Uraian	Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Target Anggaran & Belanja Th ke-				Rata-rata pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Target	Realisasi
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**6.016.523.349.824,94**	**7.339.553.859.353,52**	**7.863.227.376.466,00**	**9.464.416.237.214,37**	112,78%	106,41%	101,45%	109,83%	17,62%	16,50%
	a. Pajak Daerah	**5.907.320.403.012,00**	**7.298.242.129.260,52**	**7.816.590.831.387,00**	**9.404.933.622.356,69**	111,00%	106,06%	101,08%	109,39%	17,62%	16,99%
	- PKB	2.269.943.193.638,00	2.692.582.635.332,00	3.287.113.502.460,00	3.896.189.871.560,00	108,09%	103,16%	101,36%	108,41%	19,79%	19,74%
	- BBNKB	2.513.491.848.955,00	3.366.060.701.100,00	3.138.044.541.300,00	3.836.938.435.381,00	112,21%	106,86%	98,64%	109,63%	17,21%	16,47%
	- PBBKB	1.081.269.923.495,00	1.217.228.864.294,52	1.365.520.465.879,00	1.640.013.828.698,49	113,82%	110,36%	106,27%	110,81%	15,93%	14,95%
	- P AP	21.423.691.432,00	22.369.928.534,00	25.912.321.748,00	31.791.486.717,20	133,90%	124,28%	107,97%	132,46%	15,28%	14,31%
	- P ABT	21.191.745.492,00				131,22%					
	b. Retribusi Daerah	**1.470.772.885,00**	**2.812.741.144,00**	**2.785.962.590,00**	**2.361.996.965,00**	98,05%	187,52%	174,12%	100,51%	17,85%	25,02%
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	**107.732.173.927,94**	**38.498.988.949,00**	**43.850.582.489,00**	**57.120.617.892,68**	979,38%	256,66%	274,07%	336,00%	16,43%	-6,70%
2	**BELANJA DAERAH**	**358.693.214.016,00**	**502.939.956.208,00**	**565.881.160.526,00**	503.036.891.752,00	88,62%	95,77%	98,22%	91,42%	11,66%	13,87%
	a. Belanja Tidak Langsung	198.975.879.323,00	251.924.141.649,00	278.941.045.336,00	270.286.882.236,00	89,38%	96,70%	98,70%	92,10%	9,78%	11,41%
	b. Belanja Langsung	159.717.334.693,00	251.015.814.559,00	286.940.115.190,00	232.750.009.516,00	87,70%	94,85%	97,76%	90,63%	14,57%	17,53%

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa terdapat tiga institusi dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Para pihak tersebut adalah: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; kemudian Badan Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah; terakhir adalah PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak pelaksana pemungutan asuransi / sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan dan kemudian ditetapkan melalui keputusan bersama para pihak atau keputusan Tim Pembina Samsat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan digitalisasi proses penetapan Pajak Daerah pada suatu sistem terintegrasi dengan seluruh Kantor Bersama Samsat di Provinsi Jawa Timur, sehingga proses penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dimonitor secara akuntabel dan real time. Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Semakin meningkatnya pengeluaran Belanja Daerah untuk menanggung beban penyelenggaraan pelayanan setiap tahun;
2. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak di kendaraan bermotor, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
3. Pengelolaan arsip masih mempertahankan penyimpanan dokumen *hard copy*, mengakibatkan manajemen arsip keluar - masuk menjadi tidak

optimal dan membutuhkan penambahan luas tempat penyimpanan arsip secara kontinu karena tidak ada memberlakukan retensi arsip;

4. Semakin berkurangnya jumlah sumber daya manusia pelaksana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah.

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntukan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan;
4. Terbentuknya pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara masing-masing pihak penyelenggara pelayanan, akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor berpengaruh pada permasalahan tersebut, yaitu faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar).

Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (*Strength*) hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Budaya kerja, komitmen dan disiplin kuat antara Pimpinan dan Staf untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik;
2. Dukungan pemenuhan kebutuhan Belanja Daerah secara memadai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
3. Tersedianya prasarana pelayanan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur;
4. Memiliki platform sistem dan jaringan teknologi informasi/komunikasi serta telah terintegrasi pada seluruh Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur;
5. Pola pengembangan jenis pelayanan baru, lebih condong untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada layanan baru, baik itu diselenggarakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
6. Terjalinnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas secara baik antar institusi terkait pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Disamping kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (*Weakness*) hasil identifikasi dari internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya;
2. Belum optimalnya distribusi penempatan petugas pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara merata;
3. Komposisi golongan ruang dan Jabatan Pelaksana/Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Jumlah titik operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan..

Faktor eksternal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam lembaga. Beberapa peluang (*Opportunities*) hasil identifikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pembelian Kendaraan Bermotor Baru;
2. Dukungan regulasi dan komitmen dari para pihak terkait pengembangan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik;
3. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya pengembangan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) hasil identifikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Pelimpahan/penambahan kewenangan urusan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Provinsi akan menambah alokasi kebutuhan belanja wajib maupun belanja pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah masih dibatasi oleh regulasi karena sifatnya *closed list*;
2. Rekomendasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, berdampak pada potensi kehilangan pendapatan dari denda/sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor;

3. Mekanisme pembentukan harga jual Bahan Bakar Minyak secara bebas mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, berdampak pada fluktuasi penerimaan Pajak Kendaraan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Proses registrasi dan identifikasi sebagian besar masih menggunakan metode verifikasi pada dokumen *hard copy*, sehingga pelaksanaanya memakan waktu cukup lama;
5. Kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait dengan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor akan berpotensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak;

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	Jenis Pungutan Pajak Daerah sifatnya *closed list*	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat	Tingkat ketergantungan atas penerimaan PKB dan BBNKB semakin tinggi
Aspek Pendapatan	Tantangan untuk menentukan target Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, karena banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal	- Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Th. 2010 tentang Pajak Daerah - Perda Prov. Jatim No. 15 Th. 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD	Kebijakan penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat	Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar
Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan melalui Pengembang-an inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, perkembang-an pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk	Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas wilayah operasional
Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal	Pergub. Jatim No. 76 Tahun 2015 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2019 adalah ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak".*** Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi dengan judul ***"Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik"***.

Misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari Misi sebelumnya (Tahun 2009-2014) yaitu "Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat".

Di dalam **Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik,** menjelaskan bahwa misi ini mempunyai Tujuan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan public, dengan 8 (delapan) Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan informasi publik,
2. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas,
3. Meningkatnya minat baca masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal,
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan,
5. Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah,
6. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana,
8. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya.

Untuk dpaat mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran berdasarkan rumusan diatas, maka dilaksanakan 3 (tiga) Strategi umum sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*),

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*),
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka pada Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, maka Program-program Unggulan untuk mendukung Misi ini (Bab VII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019) difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya,
2. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik,
4. Melanjutkan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat,
5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif,
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya,
7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik,
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat,
9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan *up to date*,
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas Perangkat Daerah,

11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan,
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu,
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan *up to date*.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya) yaitu :

1. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah,**
2. **Program Pengelolaan Pajak Daerah,**
3. **Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan,**
4. **Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah,**
5. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah,**
6. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan,**
7. **Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah,**
8. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,**
9. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**
10. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.**
11. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**

Analisis lebih lanjut untuk menunjujkkan keterkaitan pemilihan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah dengan melakukan identifikasi faktor-faktor penghmbat dan pendukung terhadap pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun identifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Re-organisasi struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur belum diiringi dengan penataan lebih lanjut pada level pejabat pelaksana/fungsional,
2. Pembagian satu nomenklatur untuk masing-masing Sekretariat/Bidang dan satu nomenklatur kegiatan untuk masing-masing Sub Bagian/Sub Bidang masih belum diimbangi dengan peningkatan pengetahuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah, bagi masing-masing pelaksana program/kegiatan ,
3. Perubahan pedoman tentang pengakuan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, berakibat pada penyesuaian pola/sistem pemungutan Pajak daerah dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, masih belum teruji efektifitasnya.

Sedangkan beberapa faktor pendorong terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan dengan berbasis Teknologi Informasi,
2. Pembinaan sumber daya manusia aparatur, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi,
3. Pengembangan sistem pelaporan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: *"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"* **Misi Keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: *"Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"***			
	Program-program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur:			

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Dinamika kondisi perekonomian, dan kebijakan Pemerintah sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah	Instabilitas makro ekonomi, perubahan kebijakan APBN / regulasi Pemerintah Pusat	Basis data base objek pajak dan data pendukung lainnya cukup lengkap
2.	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Trend kebutuhan belanja terus meningkat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga tingkat penerimaan Pendapatan Daerah, melalui pengelolaan Pajak Daerah	Penerimaan dan Potensi Pajak Daerah di dominasi oleh sektor PKB dan BBNKB	Penetapan Tata kelola, SOP dan dukungan regulasi
3.	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	Bagian dari komponen Pendapatan Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi oleh masyarakat belum optimal dari sudut pandang penerimaan pendapatan	Jumlah Aset daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
4.	Program Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan PAD dan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat	Perbadingan luas wilayah dan medan operasional dengan sarpras penunjang masih belum memadai	Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait cukup baik
5.	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal dan terstandar seerta berkelanjutan dengan tujuan agar layanan semakin nyaman, mudah dan cepat	Masih terjadi deviasi antara standar dan implementasi layanan	Pelaksanaan audit dan surveillence secara berkala
6.	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
7.	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Penyelenggaraan pelayanan dituntut agar semakin efisien, aman dan terjamin kepastiannya	Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tuntutan pelayanan semakin tinggil ditengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelakasana pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak, serta overhead cost semakin meningkat	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah aset dan prosedur penghapusan piutang	Sistem dan metode pencatatan aset baku dan tertib
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penempatan dan distribusi kompetensi Aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
11.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/siklus perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan

3.3 TELAAH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) K/L

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2019.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tercapainya Peningkatan Pendapatan dari PAD	Proyeksi pertumbuhan moderat	Dinamika kondisi eksternal	Regulasi dan Koordinasi yg efektif dengan institusi terkait
2.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan	Tingkat kesadaran masyarakat	Standarisasi prosedur pelayanan
3.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Standarisasi prosedur pelayanan
4.	Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Layanan Unggulan	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tata ruang Provinsi Jawa Timur merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang secara optimal, umumnya dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Timur ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional.

Pengembangan pola ruang dalam sistem Tata ruang tersebut tentu sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Kaitan aspek pengaruh lingkungan hidup terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah terjadinya kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor baik itu kendaraan penumpang, niaga maupun kendaraan bermotor alat berat pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor adalah terjadinya polusi udara, dimana tingkat pencemarannya semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Jawa Timur cukup tinggi, dengan rata-rata prosentase pertumbuhan 10% pertahunnya. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Jawa Timur, maka probabilitas semakin buruknya polusi udara akan semakin meningkat pula.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, serta menetapkan regulasi tentang batasan emisi buang kendaraan bermotor, sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap tingkat kebersihan di udara. Namun dilakukan langkah pencegahan untuk mengendalikan tingkat kerusakan tersebut yaitu dengan melakukan fungsi *reguleren* yaitu memberlakukan tarif berbeda bagi kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor, serta dengan memberlakukan Pajak *Progresif* pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat mengendalikan proyeksi pertumbuhan kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan pemerintah daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin besarnya kebutuhan belanja daerah untuk pelaksanaan urusan tersebut, sedangkan dari sisi pemungutan pendapatan Pemerintah

Provinsi tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan dari sumber pendapatan baru, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa dipungut karena kewenangannya diambil oleh Pemerintah Pusat, seperti penerimaan dari terminal tipe A, jembatan timbang dan lain sebagainya. Hal tersebut berpotensi besar untuk memperlebar *gap* antara kebutuhan pembangunan dengan penerimaan pendapatan. Sehingga diperlukan strategi jitu agar dapat menjaga keseimbangan antara belanja dengan pendapatan dan dapat menjaga kepastian penerimaan Pendapatan Daerah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organsiasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun isu-isu strategis hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaandalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

Dalam menentukan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah), telah ditentukan panduan dalam menentukan skor kriteria rumusan isu-isu strategis, untuk mengetahui tingkat urgensinya dan kemudian dijadikan dasar dalam menentukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta menjawab tantangan/permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur kedepan. Kriteria baku berdasarkan peraturan tersebu dijabarakan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/kota	25
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Untuk menentukan nilai skala kriteria, maka kita harus menentukan parameter penilaian. Parameter yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas,
2. Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas,
3. Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas,
4. Nilai 4 untuk parameter prioritas,
5. Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas.

Tabel 3.5 Nilai Skala Kriteria

No	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
1	Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor	125	100	80	60	45	410
2	Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaandalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan	125	125	80	60	45	435
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti	100	75	60	45	45	325

Tabel 3.6
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	ISU-ISU STRATEGIS	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor	410	82
2	Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaandalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan	435	87
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti	325	65

Dari perhitungan nilai skala kriteria, maka diketahui rata-rata skor dari masing-masing isu strategis sehingga kita dapat mengetahui urutan isu strategis prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaandalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan,
2. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah dibahas pada Bab III, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan misi ke empat dengan tujuan "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik". Sasaran dari misi keempat tersebut adalah "Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur". Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan/capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator sasaran "Jumlah Pendapatan Asli Daerah" dimana tanggungjawab pencapaian indikator sasaran tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi, melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan:

Penetapan rumusan **Tujuan** Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sesuai dengan rumusan Tujuan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik,** dengan rumusan **Sasaran Pertama** sebagai berikut: **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, dan **Indikator Sasarannya** adalah **Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.** Selanjutnya rumusan **Sasaran Kedua**, sebagai berikut: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik,** dan **Indikator Sasarannya** adalah:

a. **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**;

b. **Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**;

c. **Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan**;

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Meningkatnya PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	**4,72%**	**5,80%**	**1,00%**	**2,01%**	**1,86%**
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	**88,00%**	**88,00%**	**86,00%**	**86,00%**	**86,00%**
		Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	**88**	**88**	**86**	**86**	**86**
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	**43%**	**43%**	**43%**	**52%**	**52%**

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

4.2.1 Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan,
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak,
4. Melaksanakan Penilaian Kepuasan Masyarakat Secara Reguler Atas Pelaksanaan Pelayanan,
5. Melaksanakan Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan,
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran,
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit

bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

4.2.2 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada:

   a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
   b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
   c. Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
   d. Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

2. **Bidang Pelayanan Publik**

   Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa: peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui:

   a. Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat;
   b. Pengembangan metode/prosedur pelayanan agar lebih sederhana dan baku;
   c. Pengembangan kerjasama penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga;
   d. Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;

e. Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan.
f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat.

*) Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bersepakat dengan PT. Pos Indonesia untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor pos se Jawa Timur dengan jumlah ± 850 kantor pos. Melalui kerjasama tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kesepakatan tim pembina samsat, telah melaksanakan penyederhanaan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan penetapan pajak secara elektronik dengan memanfaatkan database kendaraan bermotor secara *online*, sehingga proses registrasi dan identifikasi dari semula dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa diwakilkan ke dalam suatu sistem elektronik dan dioperasikan oleh petugas kantor pos. Begitu pula dengan proses penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat didelegasikan kepada petugas pos melalui sistem yang sama dan juga dilengkapi dengan mesin embosser elektronik, sebagai sarana pencetakan notice pajak dan pengesahan STNK. Pengembangan model kerjasama tersebut merupakan jawaban atas tantangan semakin ketatnya pengelolaan anggaran belanja daerah serta semakin menurunnya jumlah aparatur penyelenggara pelayanan.

Pengembangan pola kerjasama penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng pihak lain dengan syarat memiliki fasilitas infrastruktur dan jaringan komunikasi pada wilayah Jawa Timur serta dapat memenuhi ketentuan tentang tata cara penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah.

3. Bidang Kelembagaan

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan berbasis kompetensi dalam pengertian bahwa: kebijakan dalam bidang kelembagaan khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Meningkatnya PAD	1.Validasi potensi pendapatan	Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel
		2.Validasi data piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.Penilaian kepuasan masyarakat secara reguker	Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat
		4. Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan	kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan
		5.Validasi Data Pembayaran	Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel
		6. Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, melalui penjabaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2019, sebagaimana berikut:

I. Rencana Tahun Pertama (2015)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 218.112.223.775,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.703.436.866,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.703.436.866,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 64.302.597.996,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.149.762.270,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.152.835.726,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.617.862.067,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.632.738.646,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
   b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.617.862.067,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 904.414.840,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 366.652.490 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 327.802.350,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
   c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 212.960.000,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya

Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 68.948.173.360,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 306.212.588,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalian Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   b. **Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.534.421.326,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
   c. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait,** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.002.645.485,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   d. **Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*),** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 52.490.663,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   e. **Retribusi Tempat Pelelangan,** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 442.972.122,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.397.452.942,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

g. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

h. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 112.476.250,00 output/keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

i. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.875.625.795,00 output/keluaran adalah tersedianya Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

j. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.196.553.934,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

k. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 337.630.612,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

l. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 551.252.648,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

m. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 157.855.450,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

n. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.640.642.175,00 output / keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;

o. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.379.872.165,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

p. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.171.367.936,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

q. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.030.660.464,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

r. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.385.689.117,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

s. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.926.179.907,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

t. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.498.409.365,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

u. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.156.180.241,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

v. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.293.901.680,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

w. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.219.829.512,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

x. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.269.286.243,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

y. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.272.666.145,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

z. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.220.152.689,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

aa. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.438.310.076,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

bb. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.009.140.494,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

cc. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.141.513.376,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

dd. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.112.901.561,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ee. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.857.543.415,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ff. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.040.523.640,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

gg. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 942.707.134,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

hh. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.066.012.581,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ii. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.462.122.875,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

jj. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.346.963.089,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

kk. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.218.398.619,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ll. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.242.187.171,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

mm. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.335.597.536,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

nn. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 851.645.106,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

oo. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.526.756.355,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

pp. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 867.831.120,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

qq. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.621.616.061,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

rr. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.295.937.505,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ss. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.323.625.410,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

tt. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.095.158.724,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

uu. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 902.862.643,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

vv. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 958.479.915,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ww. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 857.911.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

II. Rencana Tahun Kedua (2016)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.169.336.861,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.116.361.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.116.361.050,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.800.615.511,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.033.737.621,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.766.877.890,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.549.492.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.662.874.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.886.618.000,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.426.617.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 487.912.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;

   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 684.545.0000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;

   c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 254.160.000,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.276.251.300,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.540.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalian Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. **Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.855.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

c. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 791.590.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. **Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*),** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.820.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

e. **Retribusi Tempat Pelelangan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 373.590.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.406.660.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

g. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.580.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

h. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 199.890.000,00 output/keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

i. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 835.900.000,00 output/keluaran adalah tersedianya Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

j. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.027.472.000,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

k. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 184.796.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

l. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 473.440.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

m. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 137.840.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

n. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.282.100.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;

o. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 710.607.200,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

p. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.983.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

q. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 586.452.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

r. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 749.187.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

s. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 922.237.008,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

t. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 871.230.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

u. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 658.848.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

v. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 784.544.800,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

w. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 673.240.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

x. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 673.325.450,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

y. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 732.054.192,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

z. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 707.880.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

aa. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 764.409.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

bb. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 534.922.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

cc. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 601.222.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

dd. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 643.733.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ee. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 989.877.150,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ff. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 565.960.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

gg. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 544.965.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

hh. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 587.550.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ii. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 804.496.700,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

jj. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 780.076.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

kk. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 707.325.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ll. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 809.106.050,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

mm. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 661.727.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

nn. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 576.044.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

oo. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 831.840.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

pp. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 529.777.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

qq. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 932.054.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

rr. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 698.796.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ss. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 734.163.150,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

tt. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 678.565.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

uu. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 496.320.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

vv. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 534.434.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ww. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 483.210.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

III. Rencana Tahun Ketiga (2017)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 56 (lima puluh enam) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 201.769.899.830,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 72.654.143.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 72.654.143.550,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.629.165.450,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.236.592.200,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.392.573.250,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.010.599.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.816.924.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka

Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.193.675.000,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.815.988.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 805.478.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 724.180.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
   c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.330.000,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.660.003.830,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 458.585.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan dan Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalian Potensi Sumber Pendapatan Daerah, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. **Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.406.055.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

c. **Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540.980.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. **Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.820.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

e. **Pelaksanaan Sertifikasi dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.782.116.500,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

f. **Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan KB. Samsat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.850.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 139.320.000,00 output/keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

h. **Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.127.500.000,00 output/keluaran adalah Jumlah software

pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

i. **Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.895.777.890,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

j. **Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 282.815.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring peningkatan penerimaan pendapatan daerah lainnya, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

k. **Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 852.400.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

l. **Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 195.960.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Bapenda yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

m. **Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.889.570.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;

n. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 619.547.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di

UPT Surabaya Timur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

o. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 704.376.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

p. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 525.648.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

q. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 630.361.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

r. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 824.125.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

s. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 675.646.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

t. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 586.730.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

u. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 638.894.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

v. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 664.074.800,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

w. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 578.394.200,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

x. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 630.486.200,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

y. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 607.932.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

z. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 696.105.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

aa. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513.256.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

bb. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 548.617.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

cc. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 523.140.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

dd. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 843.129.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ee. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 505.394.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ff. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 527.622.250,00

output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

gg. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 516.933.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

hh. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 563.742.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ii. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 728.733.540,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

jj. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 588.021.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

kk. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 565.681.250,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ll. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Probolinggo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 635.491.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

mm. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 587.128.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

nn. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 706.770.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

oo. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 543.722.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

pp. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 657.435.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

qq. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 457.791.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

rr. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Banyuwangi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 727.009.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

ss. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 417.635.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

tt. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 492.491.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

uu. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 445.008.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

vv. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 544.185.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

IV. Rencana Tahun Keempat (2018)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 11 (sebelas) program dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 210.000.000.000,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.765.940.863,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.765.940.863,00, output/keluaran persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.210.835.199,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.151.136.251,00, output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.059.698.948,00, output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.312.753.451,0000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.312.753.109,00, output/keluaran adalah Jumlah konsultasi, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
   b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000.342,00, output/keluaran adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas

SDM, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.466.943.114,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.006.705,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun, outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 430.603.849,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
   c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.332.560,00 output/keluaran adalah Jumlah update database perangkat daerah, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;
   d. **Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00, indikator output/keluaran adalah Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun, sedangkan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun tepat waktu;

5. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.774.737.686,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD, outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. **Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. **Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 852.400.000,00 output/keluaran adalah jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. **Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.772.337.686,00 output/keluaran adalah Jumlah software pendukung layanan, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. **Program Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.082.213.744,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Intensifikasi Penerimaan PKB dan BBNKB**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.249.328.246,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB dan BBNKB, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

   b. **Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.832.885.498,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. **Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.005.742.870,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.052.779.304,00

output/keluaran adalah Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan dan Jumlah Dokumen Hasil Penggalian Potensi Objek Retribusi Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. **Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.142.181.330,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 270.000.080,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. **Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540.782.156,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8. **Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.238.943.037,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.311.717.012,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Sertifikasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

   b. **Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.927.226.025,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

9. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah**, terdiri dari 3 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.832.274.255,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp 374.999.927,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;
    b. **Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.728.637.165,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;
    c. **Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.728.637.163,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Administrasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat.

10. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.792.090.045,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.001.935,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
    b. **Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.006.450,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;

c. **Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.532.081.660,00 output/keluaran adalah Jumlah Pemeliharaan Jaringan dan Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

11. **Program Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah**, terdiri dari 140 (seratus empat puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.517.525.736,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    b. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    c. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    d. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    e. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00

output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

f. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

g. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

h. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

i. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

j. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

k. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

l. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

m. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

n. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

o. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

p. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

q. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

r. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

s. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

t. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

u. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

v. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

w. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

x. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang

akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

y. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

z. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aa. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bb. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cc. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dd. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ee. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ff. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gg. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hh. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ii. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jj. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kk. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak

Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ll. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mm. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nn. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

oo. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

pp. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qq. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rr. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ss. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

tt. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uu. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vv. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ww. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xx. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yy. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zz. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaa. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbb. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ccc. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ddd. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eee. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

fff. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ggg. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhh. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iii. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjj. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kkk. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

lll. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mmm. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnn. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ooo. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ppp. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqq. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrr. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

sss. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ttt. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuu. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvv. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

www. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxx. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang

akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyy. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzz. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaa. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbb. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cccc. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dddd. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeee. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ffff. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gggg. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhh. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiii. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjj. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kkkk. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan

Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

lll. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mmmm. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnnn. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

oooo. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

pppp. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqqq. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrrr. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ssss. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

tttt. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuuu. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvvv. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

wwww. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxxx. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah

, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyyy. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzzz. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaaa. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbbb. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ccccc. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ddddd. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeeee. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

fffff. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ggggg. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhhh. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiiii. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjjj. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kkkkk. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

lllll. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mmmmm. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnnnn. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ooooo. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ppppp. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqqqq. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrrrr. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

sssss. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ttttt. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuuuu. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvvvv. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

wwwww. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxxxx. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang

akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyyyy. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzzzz. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaaaa. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbbbb. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cccccc. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dddddd. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeeeee. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ffffff. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gggggg. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhhhh. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiiiii. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjjjj. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

V. Rencana Tahun Kelima (2019)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 11 (sebelas) program dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 231.000.000.000,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.837.381.846,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.837.381.846,00 output/keluaran persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.129.924.531,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.811.097.276,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.318.827.255,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.890.579.218,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.931.205.209,00 output/keluaran adalah Jumlah konsultasi, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.959.374.009,00 output/keluaran adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM, sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.697.506.781,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 617.887.415,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 543.286.806,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
   c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.332.560,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;
   d. **Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00, indikator output/keluaran adalah Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun, sedangkan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun tepat waktu;

5. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.144.543.76100 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. **Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. **Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 output/keluaran adalah jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. **Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.094.543.761,00 output/keluaran adalah Jumlah Software Pendukung Operasional Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. **Program Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.776.048.888,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Intensifikasi Penerimaan PKB dan BBNKB**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.665.629.333,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB & BBNKB, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

   b. **Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.110.419.555,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. **Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.639.939.194,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.274.910.337,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan dan Jumlah Dokumen Hasil Penggalian Potensi Objek Retribusi Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    b. **Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.383.175.731,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    c. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 326.968.709,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    d. **Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 654.884.417,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8. **Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.654.226.698,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.440.224.198,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Sertifikasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
    b. **Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.214.002.500,00 output/keluaran adalah

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

9. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.207.717.111,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp 411.738.176,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;
   b. **Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.897.989.468,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;
   c. **Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.897.989.467,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Administrasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat.

10. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.065.627.426,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.880.246,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
    b. **Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 219.600.818,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek

Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;

c. **Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.780.146.362,00 output/keluaran adalah Jumlah Pemeliharaan Jaringan dan Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

11. **Program Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah**, terdiri dari 140 (seratus empat puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.517.525.736,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    b. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    c. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
    d. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil

yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

e. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

f. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

g. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

h. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

i. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

j. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

k. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

l. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

m. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

n. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

o. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

p. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

q. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak

Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

r. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

s. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

t. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

u. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

v. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

w. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

x. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

y. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

z. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aa. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bb. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cc. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dd. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ee. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ff. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gg. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hh. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ii. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jj. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kk. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ll. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mm. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nn. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

oo. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

pp. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qq. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rr. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ss. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

tt. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uu. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vv. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ww. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xx. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yy. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zz. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaa. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbb. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ccc. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ddd. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan

dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eee. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

fff. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ggg. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhh. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iii. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjj. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kkk. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

lll. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mmm. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnn. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ooo. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ppp. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqq. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak

Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrr. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

sss. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ttt. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuu. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvv. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

www. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxx. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyy. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzz. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaa. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbb. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cccc. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dddd. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah

, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeee. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ffff. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gggg. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhh. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiii. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjj. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kkkk. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

llll. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mmmm. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnnn. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

oooo. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

pppp. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqqq. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrrr. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ssss. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

tttt. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuuu. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvvv. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

wwww. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxxx. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyyy. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzzz. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaaa. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbbb. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ccccc. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ddddd. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang

akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeeee. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

fffff. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ggggg. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhhh. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiiii. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjjj. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

kkkkk. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

lllll. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

mmmmm. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnnnn. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ooooo. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ppppp. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqqqq. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan

Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrrrr. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

sssss. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ttttt. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuuuu. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvvvv. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

wwwww. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxxxx. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyyyy. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzzzz. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaaaa. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbbbb. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cccccc. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dddddd. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah

, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeeeee. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ffffff. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gggggg. **Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhhhh. **Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah , dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiiiii. **Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjjjj. **Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sedangkan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah					Rp 11.539.074.054.584,60	4,72%		5,80%		1,00%		2,01%		1,86%		1,86%	
			2 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah					61,70%	50%		50%		50%		-		-		50%	
			3. Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan					Rp 857.192.838.040,00	35%		80%		20%		-		-		20%	
				1.20.17	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	9.464.416.217.254	12,71%	68.948.173.492	46,09%	41.266.651.456	60,51%	34.668.004.010					60,51%	144.874.828.958
							2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.286.400.141	40%		45%		50%						50,00%	
							3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,56	87,50		88,00		88,50						88,50	
							4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008	4	1		1		1						1	
							5. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	4.631.966	25%		30%		35%						35%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1.20.17.009	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	- Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalian Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	4 kegiatan	306.212.588	4 kegiatan	142.540.000							8 kegiatan	448.752.588
				1.20.17.009	a. Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	- Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0					70 keg lelang	458.585.000					70 keg lelang	458.585.000
						- Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalian Potensi Sumber Pendapatan Daerah							10 dokumen						10 dokumen	
				1.20.17.210	b. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	- Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10 Kegiatan	11 Kegiatan	4.334.421.329	11 Kegiatan	4.129.855.000							22 kegiatan	8.664.276.329
				1.20.17.210	b. Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	- Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						11 Kegiatan	3.406.055.000					11 kegiatan	3.406.055.000
				1.20.17.212	c. Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan OBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22 Kab/ kota	22 kab/ kota	1.002.845.485	22 Kab/ kota	791.990.000							22 kab/kota	1.794.215.485
				1.20.17.212	c. Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan OBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						11 Kab/ kota	540.980.000					11 kab/kota	540.980.000
				1.20.17.213	d. Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 bank	1 bank	52.490.863	1 bank	52.820.000							2 bank	105.310.863
				1.20.17.213	d. Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						2 instansi	52.820.000					2 instansi	52.820.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1.20.17.216	e. Retribusi Tempat Pelelangan	Jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72 keg lelang	70 keg lelang	442.972.122	68keg lelang	373.590.000							138 keg lelang	373.590.000
				1.20.17.219	f. Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen surveillance ISO	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	51 dokumen surveillance/ ISO	51 dokumen surveillance/ ISO	8.397.452.942	51 dokumen surveillance/ ISO	5.397.060.000							51 dokumen surveillance/ ISO	13.794.512.942
				1.20.17.219	f. Pelaksanaan Sertifikasi dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak						850 kegiatan	2.782.116.500					850 kegiatan	2.782.116.500
				1.20.17.221	g. Peningkatan Kinerja Pelayanan	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	0	9 Dokumen	52.500.000							18 dokumen	52.500.000
				1.20.17.221	g. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan KB. Samsat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat						48 dokumen	14.050.000					48 dokumen	14.050.000
				1.20.17.222	h. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh. OPDN dan Pasal 21	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	10 kabupaten/kota	10 kabupaten / kota	112.476.250	10 kabupaten / kota	199.890.000	3 kabupaten / kota	139.320.000					13 kabupaten / kota	451.686.250
				1.20.17.223	i. Pengembangan Pusat Pengolahan Data	Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23 hardware	6 hardware	2.875.625.795	6 hardware	835.900.000							12 hardware	3.711.525.795
				1.20.17.223	i. Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	Jumlah software pendukung peningkatan PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						2 lisensi	1.127.500.000					2 lisensi	1.127.500.000
				1.20.17.224	j. Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	70 Dokumen	70 Dokumen	1.196.553.934	70 Dokumen	2.827.472.000							140 dokumen	4.224.025.934
				1.20.17.224	j. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor						70 Dokumen	1.855.777.890					70 Dokumen	1.855.777.890

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1.20.17.249	k. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	12 Dokumen	337.930.812	12 Dokumen	186.706.000							24 dokumen	522.636.812
				1.20.17.249	k. Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring peningkatan penerimaan pendapatan daerah lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						2 Dokumen	282.815.000					2 Dokumen	282.815.000
				1.20.17.257	l. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Basis PAD terhadap Pendapatan Daerah	14 dokumen	5 dokumen	551.252.848	5 dokumen	473.440.000							10 dokumen	1.024.692.848
				1.20.17.257	l. Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Basis PAD terhadap Pendapatan Daerah						5 dokumen	852.480.000					5 dokumen	852.480.000
				1.20.17.258	m. Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162 orang	162 orang	157.855.450	162 orang	137.840.000							324 orang	295.695.450
				1.20.17.258	m. Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	Jumlah sumber daya aparatur Bapenda yang kompeten	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						105	195.960.000					105	195.960.000
				1.20.17.259	n. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	Jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	92 server	46 server	5.640.642.175	46 server	2.282.100.000							46 server	7.922.742.175
				1.20.17.259	n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan						10 perangkat	1.889.570.000					10 perangkat	1.889.570.000
				1.20.17.265	o. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.379.872.165	100%	710.607.200							100%	2.090.479.365

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.265	o. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	619.547.000					100%	619.547.000
				120.17.266	p. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.171.367.930	100%	624.983.108							100%	1.796.351.038
				120.17.266	p. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	704.576.000					100%	704.576.000
				120.17.267	q. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.030.660.464	100%	586.452.900							100%	1.617.113.364
				120.17.267	q. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	525.648.000					100%	525.648.000
				120.17.268	r. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.385.689.117	100%	748.187.900							100%	2.134.877.017
				120.17.268	r. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	610.361.000					100%	610.361.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.269	c. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.926.179.907	100%	922.237.008							100%	2.848.416.915
				120.17.269	c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	824.125.000					100%	824.125.000
				120.17.270	f. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.498.405.365	100%	871.230.900							100%	2.369.640.265
				120.17.270	f. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	675.646.100					100%	675.646.100
				120.17.271	e. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.156.180.241	100%	658.848.900							100%	1.815.029.141
				120.17.271	e. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	586.730.000					100%	586.730.000
				120.17.272	v. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.293.901.880	100%	784.544.900							100%	2.078.446.480

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.272	v. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	638.894.000					100%	638.894.000
				120.17.273	w. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.219.829.512	100%	670.240.400							100%	1.893.069.912
				120.17.273	w. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	664.074.800					100%	664.074.800
				120.17.274	x. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.269.286.345	100%	673.525.456							100%	1.942.611.693
				120.17.274	x. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	578.384.200					100%	578.384.200
				120.17.275	y. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.172.666.343	100%	752.054.150							100%	2.064.720.317
				120.17.275	y. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	630.486.200					100%	630.486.200
				120.17.276	z. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.220.152.689	100%	707.880.100							100%	1.928.032.789

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				126.17.276	z. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	667.932.500					100%	667.932.500
				126.17.277	aa. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.438.310.979	100%	764.409.900							100%	2.202.719.979
				126.17.277	aa. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	696.165.000					100%	696.165.000
				126.17.278	ab. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.089.140.494	100%	554.922.900							100%	1.544.063.394
				126.17.278	ab. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	513.256.000					100%	513.256.000
				126.17.279	ac. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.141.513.379	100%	801.222.400							100%	1.742.735.779
				126.17.279	ac. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	548.617.000					100%	548.617.000
				126.17.280	ad. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.112.901.561	100%	643.733.900							100%	1.756.635.461

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				126.17.280	ad. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	523.140.000					100%	523.140.000
				126.17.281	ae. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.857.543.415	100%	989.877.158							100%	2.847.420.563
				126.17.281	ae. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	843.125.000					100%	843.125.000
				126.17.282	af. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.040.523.640	100%	565.960.900							100%	1.606.484.540
				126.17.282	af. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	565.384.000					100%	565.384.000
				126.17.283	ag. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	942.707.114	100%	544.965.900							100%	1.487.673.014
				126.17.283	ag. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	527.622.250					100%	527.622.250
				126.17.284	ah. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.066.012.581	100%	587.550.900							100%	1.653.563.481

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.284	ah. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	516.933.000					100%	516.933.000
				120.17.285	ai. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.462.122.875	100%	804.496.700							100%	2.266.619.575
				120.17.285	ai. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	563.742.000					100%	563.742.000
				120.17.288	aj. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.346.963.089	100%	780.076.900							100%	2.127.039.989
				120.17.286	aj. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	728.733.540					100%	728.733.540
				120.17.287	ak. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.218.390.819	100%	707.325.400							100%	1.925.734.019
				120.17.287	ak. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	568.021.000					100%	568.021.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.288	al. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.242.187.171	100%	809.106.050							100%	2.051.293.221
				120.17.288	al. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	565.681.250					100%	565.681.250
				120.17.289	am. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.335.597.536	100%	861.727.900							100%	1.967.325.436
				120.17.289	am. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	635.491.000					100%	635.491.000
				120.17.290	an. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	851.645.106	100%	576.044.900							100%	1.427.690.006
				120.17.290	an. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	567.128.000					100%	567.128.000
				120.17.291	ao. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.526.756.355	100%	831.840.000							100%	2.358.596.355
				120.17.291	ao. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	706.770.000					100%	706.770.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				126.17.292	ap. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	887.831.220	100%	529.777.900							100%	1.397.609.120
				126.17.292	ap. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	543.722.000					100%	543.722.000
				126.17.293	aq. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.621.616.061	100%	932.054.900							100%	2.553.670.961
				126.17.293	aq. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	657.435.000					100%	657.435.000
				126.17.294	ar. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.295.937.585	100%	698.796.900							100%	1.994.734.485
				126.17.294	ar. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	457.791.500					100%	457.791.500
				126.17.295	as. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.323.625.410	100%	734.163.150							100%	2.057.788.560
				126.17.295	as. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	727.069.100					100%	727.069.100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.296	at. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.085.158.724	100%	670.565.000							100%	1.773.723.724
				120.17.296	au. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	417.635.000					100%	417.635.000
				120.17.297	av. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	902.962.643	100%	496.220.400							100%	1.399.183.043
				120.17.297	aw. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	492.491.000					100%	492.491.000
				120.17.298	ax. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	958.479.915	100%	534.434.500							100%	1.492.914.415
				120.17.298	ay. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	445.008.000					100%	445.008.000
				120.17.299	az. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	837.911.400	100%	483.210.900							100%	1.341.122.300
				120.17.299	ava. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	544.185.000					100%	544.185.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.851	**III Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**		**Target Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)**								**12.425,0**	**3.774.737.686**	**12.656,0**	**4.144.545.761**	**25.081,0**	**7.919.283.447**
				3.07.851.001	1 Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD									2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	4 dokumen	150.000.000
				3.07.851.002	2 Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD									2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	4 dokumen	150.000.000
				3.07.851.003	3 Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi									12 dokumen	852.400.000	12 dokumen	900.000.000	24 dokumen	1.752.400.000
				3.07.851.004	4 Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Software Pendukung Layanan									2 paket	2.772.337.686	2 paket	1.094.545.761	4 paket	5.866.883.447
				3.07.852	**III Program Pengelolaan Pajak Daerah**		**Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Milyar Rupiah)**								**12.489,0**	**7.082.253.244**	**12.633,0**	**7.776.048.888**	**25.896,0**	**14.858.262.632**
				3.07.852.001	1 Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB	Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB & BBNKB									8 dokumen	4.249.328.245	8 dokumen	4.665.629.333	16 dokumen	8.914.957.579
				3.07.852.002	2 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB & BBNKB									7 dokumen	2.832.885.498	7 dokumen	3.110.419.555	14 dokumen	5.943.305.053
				3.07.853	**IV Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan**		**Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan (Milyar Rupiah)**								**22,7**	**2.194.960.651**	**23,9**	**2.658.086.087**	**46,6**	**4.853.046.738**
				3.07.853.001	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan									2 dokumen	1.052.779.304	2 dokumen	1.274.910.337	4 dokumen	2.327.689.641
						2 Jumlah Dokumen Hasil Penggalian Potensi Objek Retribusi Daerah									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.853.002	2 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak									2 dokumen	1.142.181.330	2 dokumen	1.383.175.731	4 dokumen	2.525.357.061
				3.07.853.003	3 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21									1 dokumen	220.080.080	1 dokumen	326.968.709	2 dokumen	596.968.789
				3.07.853.004	4 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah laporan kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya									4 dokumen	540.782.150	4 dokumen	654.804.417	8 dokumen	1.195.068.573
				3.07.857	V **Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah**		1 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur (Milyar Rupiah)								2.497,8	55.537.525.736	2.554	60.936.504.546	5.052,1	116.474.030.282
							2 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan (Milyar Rupiah)								2.503,9		2.548		5.050,3	
							3 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat (Milyar Rupiah)								566,5		577		1.141,6	
							4 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara (Milyar Rupiah)								576,6		587,3		1.163,9	
							5 Jumlah Penerimaan PAD di UPTMojokerto (Milyar Rupiah)								281,5		286,7		568,2	
							6 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo (Milyar Rupiah)								811,8		826,9		1.638,7	
							7 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik (Milyar Rupiah)								151,7		158,2		309,9	
							8 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang (Milyar Rupiah)								208,0		211,8		419,8	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							9 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro (Milyar Rupiah)								171,9		175,1		347,0	
							10 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban (Milyar Rupiah)								177,5		180,8		358,3	
							11 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan (Milyar Rupiah)								189,6		193,1		382,7	
							12 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi (Milyar Rupiah)								112,7		114,8		227,5	
							13 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun (Milyar Rupiah)								183,1		186,5		369,6	
							14 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan (Milyar Rupiah)								111,5		113,5		225,0	
							15 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo (Milyar Rupiah)								141,2		143,9		285,1	
							16 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan (Milyar Rupiah)								48,6		49,5		98,1	
							17 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri (Milyar Rupiah)								371,8		382,7		754,5	
							18 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung (Milyar Rupiah)								239,5		244,0		483,5	
							19 Jumlah Penerimaan PAD di UPTTrenggalek (Milyar Rupiah)								92,1		93,8		185,9	
							20 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk (Milyar Rupiah)								158,1		161,1		319,2	
							21 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota (Milyar Rupiah)								380,3		387,4		767,7	
							22 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan (Milyar Rupiah)								236,6		241,0		477,6	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							23 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota ((Milyar Rupiah)							244,4		248,9		493,3	
							24 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar (Milyar Rupiah)							264,8		269,8		534,6		
							25 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo (Milyar Rupiah)							171,1		174,3		345,4		
							26 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang (Milyar Rupiah)							120,2		122,4		242,6		
							27 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan (Milyar Rupiah)							283,0		288,3		571,3		
							28 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo (Milyar Rupiah)							65,4		66,7		132,1		
							29 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember (Milyar Rupiah)							259,3		264,1		523,4		
							30 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso (Milyar Rupiah)							59,4		60,5		119,9		
							31 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi (Milyar Rupiah)							284,3		289,6		573,9		
							32 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan (Milyar Rupiah)							74,8		76,2		151,0		
							33 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan (Milyar Rupiah)							74,2		75,5		149,7		
							34 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang (Milyar Rupiah)							43,8		44,6		88,4		
							35 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep (Milyar Rupiah)							67,1		68,4		135,5		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.001	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.800.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.534.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.002	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.003	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.057.004	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.005	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.800.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.534.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.006	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.007	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.057.008	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.009	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.010	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.011	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.012	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.013	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.310.600.482	7 layanan	1.441.734.213	7 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.014	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.015	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.016	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.017	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.680.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.018	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.019	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.020	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.021	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	11 layanan	1.876.879.244	11 layanan	2.063.490.559	11 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.857.022	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.023	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.024	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.025	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	9 layanan	1.310.680.482	9 layanan	1.441.734.213	9 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.026	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.027	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.028	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.029	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.680.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.030	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.031	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.032	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.033	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	10 layanan	1.310.800.482	10 layanan	1.441.734.213	10 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.034	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.035	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.057.036	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.037	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.310.800.482	7 layanan	1.441.734.213	7 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.038	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.039	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.040	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban	1 Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.041	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.042	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.043	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.044	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.045	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.878.879.244	6 layanan	2.061.490.559	6 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.857.046	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.047	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.048	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.049	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.876.879.244	8 layanan	2.063.490.559	8 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.057.050	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.051	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
				3.07.057.052	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.053	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.800.482	5 layanan	1.441.794.213	5 layanan	2.752.594.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.054	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.055	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.057.056	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.057	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.058	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.059	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.057.060	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.061	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	4 layanan	1.310.600.482	4 layanan	1.441.734.213	4 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.062	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.063	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.064	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.065	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	11 layanan	1.376.879.244	11 layanan	2.063.490.559	11 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	3 sertifikat		3 sertifikat		6 sertifikat	
				3.07.057.066	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.067	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	6 dokumen		6 dokumen		12 dokumen	
				3.07.057.068	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.069	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.070	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.071	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	1 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.072	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.073	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.680.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.074	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.075	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	1 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.076	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.077	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngunjuk	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.680.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.078	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngunjuk	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.079	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngunjuk	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.080	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.081	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									5 layanan	1.310.000.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.082	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.083	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.057.084	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.085	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									5 layanan	1.310.000.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.086	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.087	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.088	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.089	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									7 layanan	1.876.879.244	7 layanan	2.063.490.559	7 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.057.090	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.091	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
				3.07.057.092	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.093	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									7 layanan	1.876.879.244	7 layanan	2.063.490.559	7 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.057.094	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.095	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.096	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.097	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.876.879.244	7 layanan	2.063.490.559	7 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.857.098	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.099	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
				3.07.857.100	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.101	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.102	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.103	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.104	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.105	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.876.879.244	8 layanan	2.063.490.559	8 layanan	3.940.369.803
						2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.057.106	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.107	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
				3.07.057.108	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.109	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	4 layanan	1.310.680.402	4 layanan	1.441.734.213	4 layanan	2.752.334.695
						2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.110	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.111	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.112	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.113	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									8 layanan	1.310.680.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.857.114	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.115	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
				3.07.857.116	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.117	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									5 layanan	1.310.680.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.118	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.119	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.120	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.121	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	9 layanan	1.878.879.244	8 layanan	2.003.490.559	8 layanan	3.940.369.803
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
				3.07.857.122	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.123	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
				3.07.857.124	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.125	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.860.462	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.126	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.127	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.128	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.129	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.130	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.131	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.132	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan	1 Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.133	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	3 layanan	1.310.600.482	3 layanan	1.441.734.213	3 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.857.134	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.135	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.136	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.857.137	1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.857.138	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.857.139	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
				3.07.857.140	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak					88,63%	88%		89%		86%		86%		86%		86%	
				3.07.054	VI Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah		Persentase Layanan yang Bersertifikat		-	-	-	-	-	-	91%	4.238.943.037	92%	4.654.226.698	92%	8.893.169.735
				3.07.054.001	1 Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	Jumlah Dokumen Sertifikasi			-	-	-	-	-	-	3 dokumen /sertifikat	1.311.717.812	3 dokumen /sertifikat	1.440.224.198	6 dokumen /sertifikat	2.751.942.210
				3.07.054.002	2 Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi			-	-	-	-	-	-	3 dokumen	2.927.226.025	3 dokumen	3.214.002.500	6 dokumen	6.141.228.525
			5. Rata-Rata Nilai Survey Kepuasan					88,00	88,00		88,00		86,00		86,00		86,00		86,00	
				3.07.055	VII Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah		1 Persentase Penurunan Temuan SPI		-	-	-	-	-	-	7,5%	3.832.274.255	5,0%	4.207.717.111	5,0%	8.039.991.366
							2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan		-	-	-	-	-	-	100,0%		100,0%		100,0%	
				3.07.055.001	1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	1 Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	374.999.527	2 dokumen	411.758.176	4 dokumen	786.758.103
						2 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja									70 dokumen		70 dokumen		140 dokumen	
				3.07.055.002	2 Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Pendapatan Daerah			-	-	-	-	-	-	70 dokumen	1.728.637.165	70 dokumen	1.897.989.468	140 dokumen	3.626.626.633
				3.07.055.004	4 Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Administrasi			-	-	-	-	-	-	70 dokumen	1.728.637.163	70 dokumen	1.897.989.467	140 dokumen	3.626.626.630

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan					5.354.364	41%		41%		41%		52%		52%		52%	
				3.07.056	VIII Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan		Lama Gangguan Operasional Pelayanan DI Seluruh Jawa Timur (jam/tahun)		-	-	-	-	-	-	38	2.792.090.845	36	3.065.627.426	36	5.857.717.471
				3.07.056.001	1 Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	60.001.935	2 dokumen	65.880.246	4 dokumen	125.882.181
				3.07.056.002	2 Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi			-	-	-	-	-	-	4 dokumen	200.006.450	4 dokumen	219.600.818	8 dokumen	419.607.268
				3.07.056.003	3 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	1 Jumlah pemeliharaan jaringan			-	-	-	-	-	-	18 paket	2.532.081.660	18 paket	2.780.146.362	36 paket	5.312.228.022
						2 Jumlah pengadaan sarana pendukung									2 paket		2 paket		4 paket	
				1.20.01	IX Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan perkantoran	100%	100%	51.783.436.866	100%	68.116.361.050	100%	72.654.143.550	100%	0	100%	0	100%	192.473.941.466
				1.20.01.001	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia	peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	8.800.000 obyek	11.000.000 obyek	51.783.436.866	12.100.000 obyek	68.116.361.050	51.140.000 surat	72.654.143.550					74.240.000 surat	192.473.941.466

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.01	X Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor							100%	51.765.940.863	100%	56.837.381.846	100%	108.603.322.709
				3.07.01.001	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran							100%	51.765.940.863	100%	56.837.381.846	100%	108.603.322.709
				3.07.03	XI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	64.382.597.996	100%	70.800.615.511	100%	77.629.165.450	100%	50.250.835.199	100%	55.129.924.531	100%	318.073.138.687
				3.07.02.012	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	96 lokasi	96 lokasi	50.149.762.270	96 lokasi	35.033.757.621	96 lokasi	38.226.582.200	50 paket	27.151.136.251	50 paket	29.811.097.276	100 paket	180.382.325.618
				3.07.02.031	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	96 lokasi	96 lokasi	14.152.835.726	96 lokasi	35.766.877.890	96 lokasi	39.392.573.250	96 paket	23.099.698.948	96 paket	25.318.827.255	192 paket	137.690.813.069
				3.07.07	XII Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Prosentase kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%	1.632.738.646	100%	3.662.874.000	100%	6.816.924.000	100%	0	100%	0	100%	12.112.536.646
				1.20.07.001	a Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien	90 orang	90 orang	1.632.738.646	90 orang	3.662.874.000	90 orang	6.816.924.000					270 orang	12.112.536.646
				3.07.07.001	b Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah konsultasi	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien								90 kali	6.312.753.109	90 kali	6.931.205.209	180 kali	13.243.958.318

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1.20.07.002	c Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien	858	850 orang	30.617.862.967,00	858 orang	11.886.618.000,00	850 orang	8.193.675.000	850 orang	20.000.000.342	858 orang	21.959.374.009	850 orang	92.657.529.418
				3.07.07.002	d Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien								50 pegawai	20.000.000.342	50 pegawai	21.959.374.009	100 pegawai	41.959.374.351
						Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas sdm									500 pegawai		500 pegawai		1000 pegawai	
				3.07.08	**XIII Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**		**persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**907.454.840**	**100%**	**1.426.617.000**	**100%**	**1.835.988.000**	**100%**	**930.010.554**	**100%**	**1.161.174.221**	**100%**	**6.241.804.615**
				3.07.08.001	a Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	6 dokumen	7 dokumen	366.652.490	7 dokumen	487.912.000	7 dokumen	865.478.000	6 dokumen	500.006.705	7 dokumen	617.887.415	34 dokumen	2.777.936.610
				3.07.08.002	b Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	3 dokumen	4 dokumen	127.802.350	4 dokumen	884.545.000	4 dokumen	724.180.000	8 dokumen	430.003.849	7 dokumen	543.286.806	27 dokumen	2.710.418.005
				1.20.08.003	c Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir	Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir	100%	1 sistem	212.980.000	1 sistem	254.160.000	1 sistem	288.330.000					1 sistem	753.450.000
				3.07.08.003	d Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir								4 kali	286.332.560	4 kali	286.332.560	8 kali	572.665.120
				3.07.08.004	e Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	terpenuhinya dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun tepat waktu								13 dokumen	250.000.000	13 dokumen	250.000.000	26 dokumen	500.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2014-2019 adalah untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"***.

Dari rumusan Tujuan dan Sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai alat ukur untuk memantau tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaipan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Rumusan Tujuan Badan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Timur, adalah sesuai dengan rumusan Tujuan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik,** dengan rumusan **Sasaran Pertama** sebagai berikut: **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, dan **Indikator Sasarannya** adalah **Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, dimana tahun dasar yang digunakan sebagai referensi perencanaan adalah target PAD pada tahun 2017. Peningkatan yang dimaksud pada indikator sasaran ini adalah, adanya selisih lebih setiap tahunnya dengan membandingkan target pada tahun-n+1 dengan tahun-n. Berikut adalah rencana target PAD untuk lima tahun kedepan, dimulai dari tahun 2015 ditetapkan kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,72% dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu

Rp11.539.074.054.595,00, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 5,80%, pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 1,00 %, pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 2,01% dan pada akhir tahun RPJMD (2019) ditetapkan target sebesar 1,86%.

Selanjutnya rumusan **Sasaran Kedua**, adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik,** dan **Indikator Sasarannya**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Angka indikator tersebut diperoleh dengan cara menghitung rasio/prosentase jumlah wajib pajak yang melakukan pengesahan ulang tahunan dibandingkan dengan jumlah seluruh wajib pajak, data awal perencanaan didapatkan dari tahun 2014, dengan nilai sebesar 88,63%, kemudian ditargetkan menjadi 88,00% pada tahun 2015, untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 88,00%, sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 86,00% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 86,00%. Pada akhir periode RPJMD (2019) prosentase nya ditarget sebesar 86,00%.
b) Rata-Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima, melalui pengisian kuisioner sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proyeksi target nilai SKM adalah sebagai berikut: pada tahun 2015 ditetapkan target rata-rata nilai IKM sebesar 88,00 dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu 88,08. Pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 88,00 pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 86,00 pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 88,00 dan pada akhir periode RPJMD (tahun 2019) ditetapkan sebesar 86,00.
c) Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan, indikator tersebut adalah untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat atas pengembangan pelayanan pembayaran PKB oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Data acuan dasar jumlah pengguna layanan samsat unggulan pada tahun 2014 adalah sebesar 5.354.364 Wajib Pajak, berikut adalah proyeksi perkembangan target kinerjanya lima tahunan: pada tahun 2015 ditetapkan target 43% pengguna layanan samsat unggulan. pada tahun 2016 sebesar 43%, pada tahun 2017 sebesar 52%, pada tahun

2018 sebesar 52% dan pada kondisi akhir periode RPJMD (tahun 2019) sebesar 52%.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS & FUNGSI	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RENSTRA Tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.539.074.054.594,60	4,72%	5,80%	1,00%	2,01%	1,86%
2. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,63%	88%	88%	86%	86%	86%
3. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,08	88	88	86	86	86
4.Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	5.354.364	43%	43%	43%	52%	52%